

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta, 2016.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2009.
- Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Tarsito, Bandung, 2009.
- M. Husein harun, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2015.
- R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT.Tiara, Bandung, 2009.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana diubah

Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan

Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diubah Undang-Undang No. 1

Tahun 1960 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

diubah Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan

Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan

Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap

Sarana/Prasarana Penerbangan, diubah Undang-Undang No. 27 Tahun

1999 Tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dicabut

Sebagian Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang, bertentangan dengan UUD 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi - Perkara Nomor 6/PUU-V/2007,

bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Perkara

Nomor 013-022/PUU-IV/2006, bertentangan dengan UUD 1945 Putusan

Mahkamah Konstitusi - Perkara Nomor 013-022/PUU-IV/2006,

bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Nomor

Perkara 1/PUU-XI/2013, dicabut Sebagian Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

### **C. Sumber Lain**

Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Laporan Polisi Nomor : LP/B/1074/XI/2017/JABAR

Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/108/II/2018/DitReskrimUm